



DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PERNYATAAN	vii
Intisari	x
Absract	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Keaslian Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	34
B. Kewajiban Negara terhadap Hak Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	38
1. Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Indonesia	38
2. Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM	52
3. Kewajiban Negara Terhadap Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas	57
C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	61
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	61
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	69
D. Harmonisasi Peraturan Perundangan	79
1. Harmonisasi	79
2. Disharmoni	86
3. Harmonisasi Sistem Hukum Nasional	89
4. Harmonisasi Sistem Hukum Internasional	92
BAB III LANDASAN TEORI	97
A. Teori Non-Diskriminasi dan Keadilan	97
1. Non Diskriminasi	97
2. Keadilan	101
B. Teori Kesetaraan	118
C. Teori Penyelesaian Konflik Norma Hukum	122
D. Teori Politik Hukum	131
E. Teori Hubungan Perjanjian Internasional dengan Hukum Nasional	137
BAB IV METODE PENELITIAN	146
A. Jenis dan Sifat Penelitian	146
B. Jenis Data	148
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	153
D. Hambatan Penelitian	154
E. Tehnik Pengolahan Bahan dan Metode Analisis Data	155
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	158



A. Harmonisasi Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	158
1. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia	158
2. Kajian tentang Harmonisasi Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Pengaturan Ketenagakerjaan dan Pengaturan Penyandang Disabilitas	201
B. Kajian Harmonisasi Konvensi Internasional dalam Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia	258
1. Konsep Ketenagakerjaan dalam Konvensi PBB.....	261
2. Konsep Ketenagakerjaan dalam Konvensi ILO	261
1. Kasus posisi	315
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/PDT.Sus/2008 PT. Bina Riau Jaya Vs. Maruli Sinaga.....	319
C. Penguatan Konsep dalam Pengaturan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia	326
1. Penerapan Praktek Baik Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Negara Australia, Amerika Serikat, dan Jepang	326
2. Penguatan Konsep Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	361
3. Desain Penguatan Konsep Pengaturan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia	400
BAB VI PENUTUP	440
A. Kesimpulan	440
B. Saran	444
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi